ABSTRAK

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna. Praktik di lapangan terjadi kasus di mana akta yang dibuat memuat keterangan palsu dari penghadap. Akibat dari hal tersebut Notaris harus mempertanggungjawabkan akta yang telah dibuatnya.

Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu: 1) Mengapa Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadaa pembuatan akta yang memuat keterangan palsu dari penghadap? 2) Bagaimana implementasi pertanggungjawaban Notaris dalam hal akta yang dibuat memuat keterangan palsu dari penghadap?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti secara sengaja atau lalai mencantumkan keterangan palsu dalam akta. Implementasi pertanggungjawaban hukum terhadap notaris mencakup tiga bentuk: pidana, perdata, dan administratif. Pertanggungjawaban pidana dikenakan jika terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian berat. Pertanggungjawaban perdata muncul apabila akta menimbulkan kerugian, sedangkan pertanggungjawaban administratif diterapkan atas pelanggaran prosedur jabatan.

Saran dari Penulis, yaitu Notaris perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memverifikasi dokumen penghadap, Lembaga Pendidikan Notaris harus menambah mata kuliah grafologi dan grafonomi, serta Majelis Pengawas Notaris juga diharapkan lebih tegas dalam melakukan pengawasan dan pembinaan agar notaris menjalankan tugas sesuai prosedur dan tidak merugikan pihak lain.

Kata Kunci: Notaris, Tanggung Jawab, Keterangan Palsu

ABSTRACT

Notaries as public officials have the authority to make authentic deeds that function as perfect evidence. In practice, there are cases where the deeds made contain false statements from the parties. As a result, the Notary must be responsible for the deeds he has made.

This study raises two problem formulations, namely: 1) Why can a Notary be held criminally responsible for making a deed containing false statements from the parties? 2) How is the implementation of Notary accountability in cases where the deed made contains false statements from the parties?

This study uses an empirical legal approach method with analytical descriptive research specifications. The types of data in this study are primary data and secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used is through field studies and literature studies. The data analysis technique used is qualitative data analysis with inductive drawing of conclusions.

Based on the results of the study, it can be concluded that a Notary can be held criminally responsible if it is proven that he intentionally or negligently included false statements in the deed. The implementation of legal responsibility for notaries includes three forms: criminal, civil, and administrative. Criminal responsibility is imposed if there is an element of intent or gross negligence. Civil responsibility arises if the deed causes losses, while administrative responsibility is applied for violations of office procedures.

Suggestions from the Author, namely Notaries need to apply the principle of caution in verifying documents presented, Notary Education Institutions must add graphology and graphonomy courses, and the Notary Supervisory Board is also expected to be more assertive in supervising and coaching so that notaries carry out their duties according to procedures and do not harm other parties

Keywords: Notary, Responsibility, False Statement